
Implementasi Kebijakan Publik tentang Model Pengurangan Resiko Bencana dengan Pendekatan Pada Masyarakat Dalam Program Desa Tahan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta

¹Vibriza Juliswara, ²Rusman Rupinus Manik, ³Djuniawan Karnadjaja

*Program Studi Administrasi Publik
Universitas Gunung Kidul Yogyakarta
Korespondensi penulis: vbjuliswara@yahoo.com*

ABSTRAK

Meningkatnya bencana di Indonesia dari tahun ke tahun membuat khawatir pemerintah dan masyarakat di daerah rawan bencana. Untuk itu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencanangkan program berbasis masyarakat yaitu Destana (Desa Tahan Bencana) yang diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kebijakan publik. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi program Destana. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan tanya jawab. Hasil penelitian, BPBD DIY telah berhasil membentuk destana sebanyak 243 tersebar di empat kabupaten dan satu kota DIY, masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi potensi bencana di wilayahnya, tindakan pencegahan, menyadari dampak bencana dan cara penanggulangannya, pendidikan, dan pembentukan kelompok relawan. Kesimpulan: Program Destana di DIY terlaksana dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, kemampuan menghadapi ancaman bencana, serta proaktif, partisipatif, dan terorganisir menjadi petunjuk bahwa implementasi kebijakan public di DIY dalam pengurangan resiko bencana dapat dijadikan model untuk mengurangi dampak bencana di daerah lain.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan publik, Bencana, masyarakat, Destana

ABSTRACT

The increase in disasters in Indonesia from year to year worries the government and people in disaster-prone areas. For this reason, BNPB (National Disaster Management Agency) launched a community-based program, namely Destana (Disaster Resistant Village) which is implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Special Region of Yogyakarta through public policy. This research focuses on the implementation of the Destana program. The data collection methods were conducted through interviews and narrative question and answer. The results of the research, BPBD DIY has succeeded in forming 243 Destana which are spread across four districts and one city of DIY, the community is involved in identifying potential disasters in their area, taking preventive measures, being aware of the impact of disasters and how to deal with them, education, and forming volunteer groups. Conclusion, the Destana program in DIY was implemented by increasing public awareness, the ability to deal with disaster threats and being proactive, participatory and organized as an indication that the implementation of public policy in DIY in reducing disaster risk can be used as a model to reduce the impact of disasters in other regions.

Keywords: Implementation, Public Policy, Disaster, Community, Destana

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal memiliki banyak daerah rawan bencana, sehingga membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi bencana sangatlah penting. Dari sekitar 83.000 desa dan kecamatan di Indonesia, 53.000 berada di daerah rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun data dari tahun 2001 hingga 2020, terjadi 33.412 bencana yang menewaskan 191.529 jiwa dan merusak 2.710.441 rumah. Pada tahun 2020, bahaya hidrometeorologi seperti banjir, lahan kering, angin kencang, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan abrasi mendominasi daftar bencana alam yang terjadi.

Hingga tanggal 21 September 2021, sudah terjadi sebanyak 1.933 bencana dengan korban meninggal dunia sebanyak 514 orang dan lebih dari enam juta orang yang terdampak atau mengungsi. Hidrometeorologi menjadi penyebab utama bencana ini. Penting bagi masyarakat untuk siap menghadapi bencana agar korban jiwa

dan kerugian dapat diminimalisir. Kegiatan merehabilitasi dan merekonstruksi pasca-bencana juga butuh mengalokasikan perhatian yang besar, termasuk anggaran dan sumber daya yang cukup besar, ini yang menjadi alasan pemerintah Indonesia menjalankan program mengurangi dampak bencana yang dengan pendekatan pada masyarakat.

Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2021, Propinsi DI Yogyakarta memiliki skor Indeks dampak Bencana (IRB) sebesar 124,15. Dari 12 jenis bahaya bencana yang ada di DIY, tujuh di antaranya tergolong sebagai bahaya bencana alam, seperti gunung meletus, banjir, daerah kering, angin kencang, puting beliung, bencana longsor, gempa bumi, dan bencana tsunami. Selain itu, pandemi wabah Covid-19 pada tahun 2020 juga akan menimbulkan bencana yang dapat mengancam bisnis.

Kerentanan DIY terhadap bencana semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi dan penggunaan lahan yang semakin tidak terkendali. Meskipun upaya

penanggulangan bencana swadaya sudah dilakukan, namun kapasitas dalam hal ini belum merata dan masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi. Sementara itu, pelaksanaan multitasking dalam mengurangi dampak bencana yang dikenal dengan sebutan Penthelix juga belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan nasional mengurangi dampak bencana pada tingkat masyarakat. Kebijakan ini mencakup serangkaian kegiatan pengurangan bencana yang meliputi membangun kesadaran, peningkatan kapasitas untuk menghadapi dampak bencana, dan/atau pelaksanaan prakarsa fisik dan non-fisik yang dilaksanakan secara aktif oleh masyarakat secara partisipatif dan terorganisir.

Salah satu strategi yang dipakai dalam pembangunan Desa Tahan Bencana adalah melibatkan semua lapisan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya lokal. Selain itu, strategi ini juga berfokus pada pengurangan kerentanan,

peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta integrasi mengurangi dampak bencana ke dalam pembangunan dan dukungan pemerintah Program mengurangi dampak Bencana dengan pendekatan pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga menghadapi bencana dan mengurangi dampak di wilayah mereka. Dalam mengurangi dampak bencana, penting untuk memperhatikan masyarakat sebagai subyek utama kegiatan.

BNPB telah membangun Desa Tahan Bencana di pantai selatan pulau Jawa dengan tujuan memberdayakan masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi ancaman bencana dan pulih cepat dari dampak buruk saat terjadi bencana. Program ini melibatkan kerjasama berbagai pihak dan beberapa kementerian/lembaga dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan warga akan bahaya dan dampak bencana alam di wilayahnya. BNPB berharap dapat menambah jumlah Desa Tahan Bencana di seluruh Indonesia. BNPB mengatakan

kerjasama Pentahelix diperlukan untuk membangun dan memperluas Desa Tahan Bencana di seluruh wilayah Indonesia untuk menjadikan masyarakat tangguh bencana. Desa Tahan Bencana harus sinkron antara kementerian dan lembaga, dengan pemerintah daerah atau lembaga internasional atau lokal, karena BNPB tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Program penanggulangan Bencana dengan pendekatan pada masyarakat (PPBBK) melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari pemerintah, peneliti, relawan, dunia usaha atau stakeholders, masyarakat atau komunitas, dan media.

Wilayah Propinsi Propinsi DI Yogyakarta, BPBD dan pemerintah daerah juga melaksanakan Programa Desa Tahan Bencana dengan memperkuat sistem siap siaga untuk mendukung kegiatan cepat menanggapi keadaan darurat, perbaikan dan merekonstruksi pascabencana di desa dan kelurahan dengan membangun sistem kedaruratan bencana dan meningkatkan

perencanaan merekonstruksi. mencegah dampak baru dan mengurangi dampak bencana yang ada. Penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Desa memiliki inisiatif dan komitmen bersama untuk bekerjasama mengatasi dampak bencana. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen tertulis bersama yang disepakati oleh para tokoh masyarakat.

Pada tahun 2022, Kabupaten Gunungkidul memperkuat lima desa yang memiliki potensi bencana dengan program pembangunan dengan pendekatan pada masyarakat untuk mengurangi dampak bencana. Kelima desa tersebut antara lain Bleberan, Gari, Kemiri, Pringombo, dan Kedungkeris. Program ini dibiayai oleh BPBD provinsi. Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta, mengatakan bahwa masyarakat di daerah rawan bencana harus tanggap terhadap bencana dan harus sangat peka. Setiap desa akan mengembangkan simulasi penanggulangan bencana yang

harus dijalankan secara rutin agar informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Kabupaten Gunung Kidul juga menerapkan strategi pengurangan bencana secara mandiri dengan memetakan kelembagaan desa, potensi, melestarikan dan memanfaatkan kearifan lokal, menyiapkan sistem peringatan cepat, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun Desa Tahan Bencana, masyarakat dijadikan sebagai subyek utama kesiapsiagaan bencana dan aktif dalam semua kegiatan pembangunan dengan pendekatan pada masyarakat mengurangi dampak bencana. Dengan meningkatkan kemampuan dan kesadaran warga diharapkan dampak bencana dapat diminimalkan, Daerah Gunung Kidul sangat rawan terhadap kemungkinan longsor, banjir, dan angin puting beliung, sehingga perlu adanya ketangguhan dan penanganan cepat. Program ini juga sudah

pernah dilakukan pada kasus pemulihan ekonomi bencana letusan gunung Merapi pada tahun 2010. Masyarakat setempat juga menyadari dampak bencana dan berkomitmen untuk kesiapsiagaan bencana. Bagaimana Implementasi Model Pengurangan Resiko Bencana dengan pendekatan pada masyarakat dalam Kebijakan Publik pada Program Desa Tahan Bencana di Propinsi DI Yogyakarta. Penelitian ini menyoroiti pada cara pelaksanaan kebijakan mengurangi dampak bencana, meningkatnya peranserta warga dalam program tersebut, dan faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memahami secara baik tentang cara implementasi program mengurangi dampak bencana yang efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam program ini.

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah perbuatan yang secara sistematis dibuat oleh satu atau lebih

aktor dalam menangani problema tertentu yang dihadapi. Pendapat ini diungkapkan oleh Anderson, seorang ahli kebijakan pada tahun 1979. Sebelumnya, pada tahun 1963, Frederick juga telah memberikan definisi kebijakan yang serupa. Kedua definisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan diarahkan pada penyelesaian masalah atau persoalan yang kompleks dan memerlukan tindakan strategis dari aktor atau pelaku yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

Tahap implementasi dalam kebijakan publik sangat penting karena kebijakan hanya dapat memberikan efek setelah diimplementasikan. Tanpa tahap implementasi, kebijakan hanyalah rencana. Oleh karena itu, dalam studi kebijakan publik, fase implementasi harus diperhatikan karena seringkali terjadi konflik antara tujuan politik dan hasil nyata di masa implementasi yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Grindle (1980:6), "implementasi kebijakan" adalah upaya untuk menciptakan hubungan yang bertujuan tercapainya tujuan kebijakan

publik sebagai hasil dari tindakan, karena kebijakan publik hanya berisi garis besar tujuan dan cara untuk mencapainya. Artinya, setiap kebijakan publik harus diubah menjadi program nyata untuk kepentingan masyarakat. Implementasi juga dapat dianggap sebagai proses keterkaitan antara penetapan arah strategi dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Jones (1991: 295) memberikan definisi serupa bahwa implementasi kebijakan merupakan sekumpulan kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan program atau kebijakan sehingga dapat mencapai hasil tertentu.

Dampak Bencana

Secara umum, manajemen bencana terdiri dari manajemen dampak bencana, manajemen bencana, dan manajemen pemulihan. Tema dominan dalam manajemen dampak bencana adalah pencegahan dan mitigasi serta peningkatan kesiapsiagaan. Setelah bencana terjadi, diperlukan manajemen bencana yang meliputi tanggap darurat dan pemulihan

dini tergantung pada tingkat keparahan dampak bencana. Pasca peralihan dari tanggap darurat ke rekonstruksi, diperlukan upaya pemulihan yaitu sinergi pihak-pihak yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dampak bencana dapat diukur melalui tiga faktor, yaitu kerawanan, kerentanan, dan kapasitas di suatu wilayah. Faktor bahaya terdiri dari bencana alam. Faktor kerentanan wilayah ditentukan oleh faktor sosial budaya, ekonomi, fisik, dan ekologi. Sedangkan faktor kapasitas meliputi kebijakan dan lembaga, pengetahuan dan pelatihan, logistik, kemampuan mitigasi, antisipasi, persiapan kedaruratan, dan kemampuan pemulihan. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak bencana, kita perlu mengurangi faktor bahaya dan kerentanan wilayah serta meningkatkan kapasitas pemerintah dan komunitas dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, mengurangi dampak bencana berarti mengurangi faktor dampak

dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas komunitas.

Desa Tahan Bencana

Desa tahan bencana adalah desa yang mampu bertahan dari bencana dengan sendirinya dan cepat pulih dari dampak buruknya. Desa-desa ini dapat mengidentifikasi potensi bahaya di wilayah mereka dan mengatur sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sembari membangun kapasitas untuk mengurangi dampak bencana. Kapasitas tersebut tercermin dalam perencanaan pembangunan, yang mencakup investasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi bencana, dan pembangunan kapasitas pemulihan bencana.

Tanggung jawab pelaksanaan penanggulangan bencana terletak pada UU No. 24 Tahun 2007, yang meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan desa tahan bencana merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab

desa dan tanggung jawab pemerintah daerah, kecamatan. Pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi kegiatan ini dengan mempersiapkan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan desa. Pembangunan desa terdampak harus masuk dalam rencana pembangunan desa, baik dalam rencana pembangunan jangka menengah desa maupun dalam rencana kerja perangkat desa.

Masyarakat Desa Tahan Bencana menerima dukungan untuk pelatihan, sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap kesiapsiagaan, perencanaan dan pengembangan penanggulangan bencana hingga keberlanjutan. Masyarakat juga telah mengadopsi pendekatan masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan menjadi lebih proaktif dalam melaksanakan keputusan dan kegiatan pembangunan. Destana atau Keltana membangun koordinasi dan kerjasama yang baik antar departemen dan saling mendukung dalam penanggulangan bencana secara terpadu. Selain itu, terjalin kemitraan atau

kolaborasi antar individu, kelompok atau organisasi untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan bersama yaitu mengurangi dampak bencana. Memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan pencegahan bencana

Kajian Penelitian Terdahulu 1.) Sari dan Iqbal pada 2020, menemukan bahwa implementasi kebijakan di Kabupaten Cianjur berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. 2) Kurniawan tahun 2020 bahwa implementasi Kebijakan Desa Tahan Bencana di Desa Pangadegan, Wilayah Bandung berhasil meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 3).Wahyuningtyas dan Hadiwidjojo pada 2020, meneliti implementasi Programa Desa Tahan Bencana di Desa Cempaka, Kabupaten Klaten. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan kemauan dan kerjasama warga sebelum bencana terjadi. Hasil dari tiga kajian

menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi langkah-langkah publik untuk mengurangi dampak bencana dengan pendekatan kolaboratif, dengan fokus pada program desa tahan Bencana di DI Yogyakarta.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik diimplementasikan untuk mengurangi dampak bencana melalui keterlibatan masyarakat. Selain itu, kajian ini akan mengukur keberhasilan program desa tahan Bencana Yogyakarta dan memberikan informasi apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas program tersebut, sehingga penelitian ini akan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan strategi mitigasi dampak bencana melalui pendekatan kolaboratif di wilayah lain di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan guna mengkaji implementasi model kebijakan publik dalam mengurangi dampak bencana dengan pendekatan masyarakat. Metode ini menitikberatkan pada pengembangan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui analisis data kualitatif seperti wawancara, observasi dan dokumen. Data sekunder berupa hasil survei, dokumen, informasi pemerintah desa, memo, buku, laporan dan foto dari BPBD DI Yogyakarta, BPBD Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Desa Kemadang dipergunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data primer didapat dari observasi langsung dan wawancara langsung dengan fasilitator BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Gunung Kidul, pengelola Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB), kepala desa dan pengelola desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara kepada pemangku kepentingan yang terlibat di Desa Bencana Tangguh untuk mengamati fenomena yang terjadi dan memahami bagaimana mereka terlibat dalam pengelolaan sejak awal. Penelitian dokumen dilakukan dengan menggunakan informasi yang ada dari berbagai sumber seperti BPBD DIY, BPBD Kabupaten Gunungkidul dan pemerintah desa. Triangulasi digunakan untuk memastikan akurasi data dengan membandingkan data dari beberapa sumber data yang berbeda. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat diuji dengan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan data dari beberapa sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPBD Provinsi DI Yogyakarta (DIY)

berkomitmen untuk terus membangun desa tahan Bencana di seluruh provinsi. Setiap desa binaan mengacu pada Standar Nasional Bencana Indonesia (SNI). Dari 438 desa sasaran DIY, 301 desa dinilai rawan bencana BPBD DIY menargetkan

seluruh desa di lima kabupaten/kota tangguh bencana pada tahun 2023. Saat ini telah terbentuk 243 desa sebagai desa tahan Bencana. Desa-desa ini harus memenuhi standar SNI 8357:2017 secara bertahap untuk mengurangi dampak bencana.

Memiliki desa tangguh memungkinkan warga desa memahami ancaman dan potensi bencana di wilayahnya. Hal ini dapat dicapai dengan membuat rambu-rambu dan jalur evakuasi yang berguna jika terjadi bencana. Selain itu, jalur dan rambu evakuasi pascabencana harus sesuai dengan standar yang dapat dipahami oleh penduduk setempat.

BPBD Provinsi D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pra, saat dan pasca bencana, tanggap darurat, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. BPBD juga memberikan pedoman dan petunjuk yang adil dan wajar dalam penanggulangan bencana, tanggap

darurat, penyelamatan dan rekonstruksi sesuai dengan keadaan setempat.

Selain itu, BPBD memberikan informasi kepada masyarakat terkait upaya kesiapsiagaan bencana dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Ancaman Bencana didasarkan pada wilayah yang terkena dampak bencana. Risiko bencana lebih tinggi di daerah yang terkena dampak kekeringan dan gempa bumi. Di daerah rawan bencana, terutama daerah yang terkena gempa, perencanaan dan pembangunan daerah harus dipantau dengan baik.

Indeks Kerentanan Ekonomi akan mengalami perubahan signifikan pada tahun 2021, seiring dengan penurunan indikator pertumbuhan ekonomi. Perhitungan kerentanan yang akurat dalam hal populasi yang terpapar dan jumlah korban jiwa diperlukan untuk melengkapi perhitungan Indeks Kerentanan Ekonomi dengan batas administrasi yang lebih rinci. Indeks ketahanan bencana sama untuk

semua bencana, dengan indeks ketahanan daerah DIY tahun 2021 sebesar 0,79 (sedang). Indeks Dampak Bahaya DIY 7 tahun 2021 adalah 124,15 “Sedang”. Indeks dampak bisnis untuk bencana DIY turun dari tahun lalu, dari 125,15 “serius” pada 2020 menjadi 124,15 pada 2021. Skor tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan setiap tahunnya,

BPBD DI Yogyakarta selalu bekerja sama dengan mitra sebagai nara sumber dalam melakukan program aksi sosial dan latihan bencana alam. Mitra tersebut antara lain lembaga seperti PPTK Pusat Kementerian ESDM Yogyakarta, Balai Sabo Kementerian Pekerjaan Umum Yogyakarta, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) D.I. Yogyakarta, PMI, BPBD Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah.

Fenomena Alam D.I. Yogyakarta.

Lanskap D.I. Yogyakarta dibatasi oleh Gunung Merapi yang masih aktif di sebelah utara, Perbukitan Menoreh dan Sungai Kali Klong Progo di sebelah barat,

serta sungai utama yaitu Sungai Kali Progo di sebelah selatan yang bermuara di Laut Indonesia. Di sebelah timur adalah perbukitan dan Sungai Boko. Sungai Opak juga mengalir ke selatan dan bermuara di Laut Indonesia. Di tengah adalah Sungai Kodo yang mengalir pusat Kota Yogyakarta, dan Sungai Kuning yang mengalir bagian timur Kota Yogyakarta.

Akibat fenomena alam yang terjadi di wilayah Yogyakarta, potensi bencana alam berupa erupsi Gunung Merapi dengan bahaya utama (lahar panas, awan panas, hujan abu). Banjir bandang sebagai bencana sekunder. Untuk mengetahui peluang terjadinya tanah longsor, perlu dilakukan identifikasi tempat terjadinya fenomena alam. Perbukitan curam, batulumpur, formasi geologi di daerah curam, dan erosi tanah yang parah. Keadaan lingkungan alam sebenarnya merupakan faktor internal dari alam itu sendiri, dipadukan dengan pengaruh faktor eksternal seperti curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia, fungsi bumi tidak

dapat dikendalikan dan dapat diubah, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan, mengganggu lereng, dan akhirnya menyebabkan bencana global.

Ancaman Bencana Di Wilayah Propinsi DI Yogyakarta

Wilayah DIY rawan terhadap berbagai jenis bencana alami. Letusan gunung berapi dapat menimbulkan bahaya primer seperti abu, aliran lahar, batu terbang, dan awan panas, serta bahaya sekunder seperti banjir lahar. Aliran lahar terbentuk ketika material piroklastik bercampur dengan air hujan dan mengalir ke sungai yang mengalir dari puncak.

Aliran lahar yang mengalir cepat dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Contoh luapan air hujan terjadi di kawasan Kari Gendol. Boyong Sleman dan K.Putih Magelang pada November 2011. Tanah longsor disebabkan oleh faktor alam seperti kondisi geologi tanah liat, strata yang sesuai aturan, dan erosi tanah yang berlebihan, serta faktor manusia seperti struktur patahan dan aktivitas manusia. Contoh longsor terjadi pada tahun 2001

di Kecamatan Kulonprogo, Samigaroo, Desa Semagung, Kecamatan Kedungrong, dan Desa Mudon, Kecamatan Gudansari, Kabupaten Gunung Kidul. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi yang terperangkap dengan keras dari tumbukan lempeng tektonik yang bergerak. Gempa bumi dapat menyebabkan bangunan runtuh dan tanah retak. Contoh gempa adalah Sesar Opak dengan kekuatan 5,9 SR yang terjadi di Yogyakarta pada 27 Mei 2006.

Tornado adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan lebih dari 120 km yang terbentuk di daerah tropis akibat perbedaan tekanan dalam sistem cuaca. Di Indonesia, topan diketahui menelan pusaran dengan radius puluhan kilometer dengan kecepatan melebihi 20 hingga 60 kilometer per jam.

Tsunami berasal dari dasar laut dan disebabkan oleh gempa bumi yang lebih besar dari 6,5 SR. Tsunami dapat menghantam tanah dan menghasilkan gelombang laut dengan amplitudo ratusan meter. Daerah DIY yang rawan tsunami

adalah pantai selatan Yogyakarta, seperti Parantritis, Desa Bantul di Gading Sari Sanden, Pantai Gulaga di daerah Klong, Progo dan Gadingharjo, serta Pantai Barong di Kabupaten Gunung Kidul.

Implementasi Program Desa Tahan Bencana Di Propinsi DI Yogyakarta

Program Desa Tahan Bencana Yogyakarta merupakan program penanggulangan bencana yang bertujuan untuk meminimalisir korban jiwa dan harta benda saat terjadi bencana. Program ini memberikan pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mempersiapkan diri dan merespon bencana secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalkan dampak bencana, seperti melalui keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, menjadi sangat penting.

Program desa tahan Bencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Namun,

pengecanaan bencana bukan hanya masalah nasional, tetapi juga masalah masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, pengertian desa dan kelurahan adalah suatu wilayah yang berasal dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut. masyarakat hukum dengan batas-batas dan kekuasaan. Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa Tahan Bencana Di Propinsi DI Yogyakarta

Desa tahan Bencana adalah desa yang secara unik dapat beradaptasi dan mengatasi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh bencana dan pulih dengan cepat dari dampak buruk bencana. Diharapkan dengan adanya program desa tangguh masyarakat di daerah rawan bencana dapat mempersiapkan diri dan meminimalisir dampak bencana. Selain itu, program ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan

pengetahuan dalam penanggulangan bencana sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam upaya penanggulangan bencana

Pelaksanaan Program Desa Tahan Bencana di Yogyakarta telah berlangsung sejak tahun 2012. Pelaksanaannya terbagi atas APBD DIY, APBD kabupaten/kota, APBN dan 243 desa/kelurahan yang didanai oleh LSM. Jumlah desa/kecamatan tangguh bencana di setiap kabupaten/kota di DIY adalah Kota Yogyakarta (31), Kabupaten Bantul (43), Kabupaten Klong Progo (43), Kabupaten Gunung Kidul (68), dan Kabupaten Sleman (58). .). Sedangkan jumlah Desa Tahan Bencana DIY berdasarkan tahun berdirinya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 51 pada tahun 2012, 9 pada tahun 2013, 15 pada tahun 2014, dan 19 pada tahun 2015, 2016 (24 kasus). , 2017 (46), 2018 (40), 2019 (39).

Desa/kelurahan/kelurahan yang menjadi desa/kerlahan tangguh bencana dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019

adalah: 1) Kota Yogyakarta: Bener, Cokrodingratan, Gowongan, Muja-muju, Prawirodirjan, Prenggan, Sorosutan, Tegalpanggung, Tegalrejo, Terban, Wirogunan, Pandeyan, Kricak, Purbayan, Keparakan, Klitren, Bausasran, Brontokusuman, Bumijo, Giwangan, Mantrijeron, Pakuncen, Pringgokusuman, Sosromenduran, Suryodiningratan, dan Warungboto. 2) Kabupaten Bantul: Baturetno, Bangunjiwo, Canden, Caturharjo, Donotirto, Drono, Imogiri, Jambidan, Jetis, Karangtalun, Kebonagung, Kemadang, Krandegan, Kretek, Panggang, Playen, Pleret, Pundong, Sanden, Srandakan, Sumbermulyo, Trimurti, Trirenggo, Tirtomulyo, Wukirsari, Piyungan, Pajangan, Pandak, dan Sewon. 3) Kabupaten Kulon Progo: Candimulyo, Cepit, Cijulang, Girimulyo, Hargowilis, Kalibawang, Kokap, Lendah, Minggir, Nawangan, Nglipar, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Sruweng, Temon, Wates, Jatimulyo, Jatiroto, dan Panjatan.

Kabupaten Gunungkidul: Banjarejo, Dlingo, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Patuk, Playen, Ponjong, Pundong, Rongkop, Semanu, Saptosari, Wonosari, Bejiharjo, Bleberan, Gading, Gondang, Grogol, Jepitu, Karang, Ngestirejo, Nglanggeran, Purwosari, Sambipitu, Srungg.

Pengembangan Program Desa Tahan Bencana

Pembangunan Desa Tahan Bencana merupakan upaya swadaya masyarakat untuk mengurangi dampak bencana. Ini mencakup semua jenis pengurangan dampak bencana yang dipimpin oleh masyarakat, seperti pengurangan kerentanan dan kesiapsiagaan bencana.

Di desa tahan bencana, masyarakat berpartisipasi aktif dalam penelitian, analisis, pengelolaan, pemantauan, dan mitigasi dampak bencana lokal, menggunakan sumber daya lokal untuk memastikan keberlanjutan. Tujuan pembangunan Desa Tahan Bencana antara lain melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rawan dari dampak bencana,

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi dampak bencana, dan mengelola masyarakat untuk mengelola sumber daya, masyarakat lokal dan mempertahankan kearifan lokal untuk mitigasi bencana.

Meningkatkan kapasitas pemerintah untuk memberikan sumber daya dan bantuan teknis untuk mengurangi dampak bencana, dan pelaku pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi terkait lainnya Memperkuat kerjasama antar kelompok.

Desa pencegahan bencana dan desa tahan bencana memiliki tujuan yang sama: manajemen pencegahan bencana berbasis masyarakat. Namun, tujuan Desa Tahan Bencana meliputi pemahaman dan kesadaran masyarakat, membangun jaringan dan memperkuat kohesi sosial, merencanakan dan memastikan

keberlanjutan, potensi penanggulangan bencana dan mengoptimalkan sumber daya melalui pendekatan masyarakat, dll sehingga cenderung lebih rumit. Tujuan Desa Tahan Bencana adalah untuk meningkatkan program penanggulangan bencana melalui pendekatan kolaboratif.

Organisasi dan Pelaksana

Desa tahan Bencana merupakan program pengurangan dampak bencana pendekatan masyarakat yang ditetapkan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh gubernur/walikota. Pendirian desa tahan bencana harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain kerentanan terhadap jenis bencana tertentu dan keterlibatan aktif masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Sistem manajemen desa tahan bencana terdiri dari pemimpin dan anggota, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, dan setidaknya empat departemen: evakuasi, dapur umum, logistik, dan perumahan. Tim siaga bencana masyarakat terdiri dari 30-50 relawan yang tinggal di masyarakat dan telah menjalani pelatihan pertahanan sipil.

Desa tahan bencana dilaksanakan melalui forum yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat, relawan dan RT. Belum ada struktur organisasi khusus yang dibentuk untuk Desa Tahan Bencana, namun kelompok dapat dibentuk secara terarah atau menggunakan kelompok desa, kelompok wilayah dan kelompok industri/kategori yang ada dapat dikembangkan lebih lanjut. Masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan Desa Tahan Bencana dan tim Tagana.

Desa tangguh untuk masyarakat, oleh masyarakat, dan pelibatan masyarakat dapat dicapai melalui pendekatan kolaboratif melalui tim siaga bencana atau tim relawan penanggulangan bencana. Pada tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merumuskan pedoman umum Desa Tahan Bencana untuk membangun kapasitas desa melalui pelatihan pelibatan masyarakat, termasuk perangkat desa, kelompok relawan, dan kelompok relawan perempuan. Desa Tahan Bencana menyusun rencana aksi untuk

memitigasi dan mengelola dampak bencana berdasarkan kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana. Manajemen bencana desa meliputi pemetaan dan analisis risiko, pemetaan dan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, mitigasi struktural, model ketahanan keuangan untuk mengurangi kerentanan dan melindungi kesehatan kelompok rentan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam untuk memitigasi dampak. Komunitas utama sumber daya produktif. Untuk memahami dan memperluas jangkauan Desa Tahan Bencana, BNPB bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional menyusun kriteria Desa Siaga Bencana dan Personil Desa Tahan Bencana.

Badan Standardisasi Nasional telah menerbitkan SNI 8357-2017 tentang Desa Tahan Bencana. Sistem pengelolaan Desa Tahan Bencana terdiri dari seorang pemimpin dan anggota termasuk ketua, sekretaris, bendahara, dan setidaknya empat departemen: evakuasi, dapur umum,

logistik, dan perumahan. Tim kesiapsiagaan bencana masyarakat terdiri dari 30-50 sukarelawan yang memiliki pelatihan pertahanan sipil atau serupa dan tinggal di masyarakat. Untuk memperluas cakupan Program Desa Tahan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional untuk mengembangkan standar Desa Siaga Bencana dan Desa Tahan Bencana.

Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik dalam Program Desa Tahan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta

Implementasi Kebijakan Publik Model Pengurangan Risiko Bencana dengan Pendekatan Masyarakat Program Kampung Tangguh Bencana Yogyakarta terbukti berhasil, dan beberapa faktor mempengaruhi keberhasilan program ini. Faktor-faktor ini. Dukungan masyarakat dan partisipasi aktif dalam membangun Desa Tahan Bencana. 1) Partisipasi dalam Perencanaan: Masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi potensi bencana di

wilayah mereka dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengurangi dampak bencana. 2) Pelaksanaan tindakan pencegahan: Pemerintah kota mengambil tindakan pencegahan seperti memasang alat pemadam kebakaran dan memasang peralatan manajemen krisis. 3) Kesadaran dan Pemahaman: Masyarakat sangat menyadari dampak bencana dan cara penanggulangannya. Pendidikan, kampanye kesadaran, dan pembentukan kelompok relawan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Partisipasi Program: 4) Masyarakat berpartisipasi dalam program pengurangan risiko bencana yang disponsori oleh pemerintah atau lembaga lain. 5) Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kelompok relawan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

menghadapi dampak bencana. Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program. Masing-masing pihak memainkan peran yang berbeda dalam kerjasama ini. 6) Pemerintah akan menyediakan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan termasuk anggaran, keahlian dan peralatan. Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam program yang mencakup pengembangan dan penerapan kebijakan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun ketahanan terhadap bencana. 7) LSM dan sektor swasta memberikan dukungan dan donasi dalam bentuk dana atau sumber daya lainnya.

SIMPULAN

Implementasi program meliputi dukungan terhadap proses pengambilan keputusan dan partisipasi aktif masyarakat, partisipasi sukarela dalam pelaksanaan program, dukungan dari pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, serta dukungan dari otoritas terkait. Dengan

dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, serta kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, Program Kampung Tangguh Bencana DI Yogyakarta berhasil mengurangi dampak bencana.

Upaya mengurangi dampak bencana melalui pembentukan sebanyak 243 desa pada Program Desa Tahan Bencana (Destana) dan Pendekatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana. Program tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana, serta melaksanakan upaya fisik dan non fisik secara proaktif, partisipatif, dan terorganisir.

Berdasarkan implementasi kebijakan public di DIY maka Program Desa Tahan Bencana dapat dijadikan model untuk mengurangi dampak bencana di daerah lain.

Berdasarkan hasil penelitian, Program Desa Tahan Bencana di

Yogyakarta tetap dilanjutkan dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat peran dan dukungannya dalam program ini agar lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan terkait pelaksanaan program serupa di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris dengan pendekatan pada masyarakat Aset Komunitas*, Depok: FISIP UI PRESS.
- Anwar, H. Z. (2016). *Masyarakat Tangguh Bencana: Membangun dan Menguatkan*. Bandung: Halima dengan Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press, New Jersey
- Habibullah. (2013). *Kebijakan Penanggulangan Bencana dengan pendekatan pada masyarakat Komunitas : Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*.
- Hamidi, M. S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press.
- Kurniawan, D. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Desa Tangguh di Desa Pangadegan Kecamatan Cihideung daerah Bandung. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 116-128.
- Sari, D.M. dan Iqbal, M. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana dengan pendekatan pada masyarakat Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24 (1), 31-44.
- Sugiyono,(2008) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tesoriero, J. I. (2016). *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Wahab, A. Solichin. (1997). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi. Aksara.
- Wahyuningtyas, A., & Hadiwidjojo, D. (2020). Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Sebagai Pedoman Penanggulangan Bencana dengan pendekatan pada masyarakat (Studi Kasus Di Desa Cempaka, Kabupaten Wedi, Kabupaten Administratif Klaten). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24 (2), 142-155.
- Wawan Andriyanto dkk, 2011, *Siaga Selalu Aman Seterusnya, Sebuah Pembelajaran Menuju Desa Tangguh*, YP2SU, Yogyakarta.

Wigyo Adiyoso, S. M. (2018).
*Manajemen Bencana,
Pengantar dan Isu-Isu
Strategis*. Jakarta.

Undang-Undang :

Undang-Undang No.24 Tahun
2007 tentang
Penanggulangan Bencana
dan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintahan RI Nomor21
Tahun 2008 tentang
PenyelenggaraPenang gulangan
Bencana. Jakarta: BNPB.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nasional.
Jakarta: BNPB.

Peraturan Menteri SosialRI Nomor
128 Tahun 2011 tentang Kampung
Siaga Bencana. Jakarta:
Kementerian Sosial RI

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Nomor 1 tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Desa/kelurahan
Tangguh Bencana. Jakarta:
BNPB

http://bpbd.jogjaprov.go.id/assets/uploads/Lokasi_Destana_Katana_2019.pdf

<http://bpbd.jogjaprov.go.id/spab-dan-destana>

<https://bpbd.gunungkidulkab.go.id/>

<https://bpbd.slemankab.go.id/page/6/?file=gallery%2F>